



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Padang, Sumatera
Barat, Indonesia

***Correspondence:**

sindirdm12@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v7i1.23647](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.23647)

Sitasi:

Rahmadanni, S, P, N., & Deviani.
(2024). Demokrasi, Kekuatan Politik,
Dan Ukuran Pemerintah Daerah
Terhadap Transparansi Pemerintah
Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal
Akademi Akuntansi*, 7(1), 114-128.

Proses Artikel

Diajukan:

6 Desember 2022

Direviu:

10 Desember 2022

Direvisi:

18 September 2023

Diterima:

24 November 2023

Diterbitkan:

16 Februari 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Sindy Putri Nur Rahmadanni^{1*}, Deviani²

ABSTRACT

Purpose: *The study aims to examine and analyze the effect of democracy, political strength and local government size on transparency of provincial local government in Indonesia.*

Methodology/Approach: *The study used quantitative methods. The secondary data was collected from provincial local government in Indonesia from 2018 to 2020. Transparency of provincial local government was measured using the result of monitoring and evaluation of public information from the Commission of Information for Indonesia (Komisi Informasi Indonesia).*

Findings: *The study finds that democracy and local government size had a positive effect on transparency of provincial local government in Indonesia and the political strength has no effect on transparency of provincial local government in Indonesia.*

Practical and Theoretical Contribution/Originality: *This study contributes to add insight and knowledge in the field of accounting, especially in public sector accounting about the factors that influence transparency in the local government.*

KEYWORDS: *Democracy; Local Government Size; Political Strength; Transparency.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Metode/Pendekatan: Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Jenis data sekunder dikumpulkan dari pemerintah daerah provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020. Transparansi pemerintah daerah provinsi diukur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat Indonesia.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kekuatan politik tidak berpengaruh terhadap



transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
Kontribusi Praktik dan Teoritis/Orisinalitas:
 Penelitian berkontribusi untuk menambah literatur di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik tentang faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah.

KATA KUNCI: Demokrasi; Kekuatan Politik; Ukuran Pemerintah Daerah; Transparansi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa seluruh badan publik, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempublikasikan informasi publik setiap kegiatan yang dilakukan. Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini adalah Komisi Informasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi merupakan prinsip terbuka dan jujur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan sumber daya secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan adalah transparansi yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan tersedianya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai ([Sofyani & Tahar, 2021](#)). Transparansi berarti dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak berkepentingan, salah satunya masyarakat. Secara umum, transparansi adalah pengungkapan informasi yang relevan secara tepat waktu dan sistematis ([Krah & Mertens, 2020](#)). Dengan adanya prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan ([Tahir, 2011](#)). Menurut [da Cruz et al., \(2016\)](#) untuk meningkatkan tata kelola terhadap pelayanan publik diperlukan adanya transparansi yang akan memberikan jalan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan perhatian pemerintah terhadap transparansi semakin gencar dilakukan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 yang berisikan agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk ikut berpartisipasi mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Agar transparansi dapat terwujud maka pemerintahan dapat menyampaikan informasi kepada publik melalui media agar mudah diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

JAA

7.1

Di Indonesia hampir seluruh pemerintah daerah telah memiliki *website* resmi, namun pemanfaatan *website* untuk keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah masih minim ([Al Asyari & Helmy, 2020](#)). [Martani et al., \(2013\)](#) melakukan penelitian mengenai tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dari total 491 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 429 *website* pemerintah daerah yang

bisa diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja *website* resmi pemerintah daerah hanya sebesar 15%.

[Agustin \(2014\)](#) dalam risetnya ditemukan bahwa kesungguhan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam memanfaatkan *website* resmi masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran daerah masih sangat rendah. Dari 19 kabupaten/kota yang diteliti, hanya terdapat 9 kabupaten/kota yang menyediakan data transparansi pengelolaan anggaran daerah ataupun data lainnya di *website* resmi secara lengkap dan konsisten. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan [Ritonga & Syahrir \(2016\)](#) juga menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di 34 pemerintah provinsi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 16,84%, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi masih menganggap data pengelolaan keuangan daerah masih bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umu.

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) mengenai Keterbukaan Informasi Publik hingga saat sekarang belum berjalan sesuai harapan ([Muhtar et al., 2017](#)). Meskipun telah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak badan publik termasuk pemerintah provinsi yang belum menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, hanya 10 pemerintah provinsi yang dikategorikan informatif, 5 pemerintah provinsi menuju informatif, 9 pemerintah provinsi cukup informatif, 3 pemerintah provinsi yang kurang informatif, dan 7 pemerintah provinsi yang tidak informatif.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri ([mediaindonesia.com 18/09/2017](#)) menyatakan bahwa penyebab terhambatnya proses transparansi pemerintah daerah kemungkinan terjadi karena sulitnya mendapatkan informasi publik karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki tingkat kompleksitas, dan jenis masyarakat yang berbeda-beda pula. Masyarakat di beberapa daerah pun kurang diedukasi mengenai apa pentingnya mengetahui pengelolaan dan jalannya pemerintah secara transparan. Adanya transparansi berarti pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat aktif bersama pemerintah dalam pembangunan di daerahnya. Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah juga membuktikan bahwa pemerintah daerah sebagai penerima amanat telah menjalankan amanah yang diberikan masyarakat sebaik mungkin dan ingin terus dipercaya oleh masyarakat.

[Jensen & Meckling \(1976\)](#) menyatakan bahwa dalam teori agensi pihak prinsipal dan pihak agen membuat dan melaksanakan suatu kontrak atau kesepakatan dimana prinsipal dalam hal ini masyarakat memberikan tanggung jawab kepada pihak agen yaitu pemerintah daerah untuk melakukan pengambilan keputusan yang akan disetujui bersama.

Berdasarkan teori ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Dalam hubungan keagenan dapat memunculkan *agency problem* berupa asimetri informasi yang mendorong terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum sehingga pemerintah daerah sebagai agen yang menyelenggarakan kepentingan publik memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan publik ([Trisnawati & Achmad, 2013](#)). Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas pemerintah berhak memperoleh pelayanan dan mendapatkan informasi secara terbuka dari pemerintah daerah. Salah satu cara untuk meminimalisir konflik kepentingan

adalah pemerintah wajib untuk mempublikasikan informasi publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

117

Penelitian ini dilakukan dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu tahun 2018-2020 hal ini karena pemilihan kepala daerah tahun 2018 menjadi sorotan, dengan terpilihnya kepala daerah yang baru akan membawa perubahan yang berarti bagi regulasi dan pembangunan daerah tersebut. Begitupun, dengan transparansi yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru atau kepala daerah yang meneruskan jabatan akan ada perubahan untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tahun 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) terbesar yang dilakukan serentak oleh 17 provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, sedangkan pilkada tahun 2017 yang digelar serentak tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 7 provinsi di Indonesia. Kemudian, sisanya sebanyak 10 provinsi mengikuti Pilkada tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Polemik yang terjadi akibat pergantian kepala daerah inilah yang menjadikan sorotan terhadap transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru seakan terdesak untuk lebih transparan dibidang apapun. Pilkada besar-besaran terjadi pada tahun 2018 dan beberapa Gubernur yang baru saja dilantik sudah menjadi tangkapan KPK di tahun 2019. Gubernur provinsi Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf merupakan gubernur yang meneruskan jabatan hingga periode 2 namun di awal periode 2-nya, Irwandi ditangkap KPK setelah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada 3 Juli 2018. Hal ini juga terjadi pada Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi dan Gubernur Kepulauan Riau yang mana gubernur tersebut ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi di masa jabatannya menjabat sebagai Gubernur yang baru dilantik.

Relatif rendahnya transparansi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi isu yang cukup *urgent* untuk diperbaiki, mengingat adanya media *website* yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya secara transparan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi pemerintah daerah melalui *website* pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh [Krah & Mertens \(2020\)](#) di Ghana. Dalam penelitiannya, [Krah & Mertens \(2020\)](#) menggunakan variabel baru berupa demokrasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah dan hasil risetnya membuktikan bahwa demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap tranparansi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama mengingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dan masih belum ada penelitian yang menggunakan variabel ini di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, secara ringkas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Keterbaruan penelitian ini pada konteks akuntansi terletak pada satu variabel independen baru yang diusulkan yaitu demokrasi. Penelitian ini berkontribusi menambah literatur di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi pemerintah di Indonesia.

JAA

7.1

Pada teori agensi, pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen harus menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal. Dalam penyelenggaraan demokrasi, pemerintah (agen) wajib untuk menyampaikan informasi

secara terbuka karena masyarakat (prinsipal) memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud pemerintahan dalam mengimplementasikan *good governance*, dimana salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Masyarakat yang memperoleh lebih banyak informasi akan memiliki kemampuan ikut serta yang lebih baik dalam proses demokrasi (Rachmatie *et al.*, 2013).

Demokrasi adalah pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara, maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya (ombudsman.go.id, 2020). Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. [Krah & Mertens \(2020\)](#) dalam penelitiannya menemukan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah dan hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa demokrasi mampu meningkatkan transparansi ([Bauhr & Grimes, 2014](#); [Curtin & Meijer, 2006](#); [Fairbanks *et al.*, 2007](#)). Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, maka disposisi transparansi pemerintah daerah meningkat. Penelitian [Krah & Mertens \(2020\)](#) membuktikan bahwa demokrasi secara signifikan mampu meningkatkan transparansi, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, transparansi oleh pemerintah daerah akan meningkat. Oleh karena itu, transparansi di pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan memperdalam budaya demokrasi di tanah air. Selain itu, ketika tingkat transparansi pemerintah daerah tinggi maka akan lebih mudah untuk mengungkapkan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H1: Demokrasi berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

Dalam teori agensi, kurangnya transparansi dapat menciptakan keuntungan bagi pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan mereka, pemerintah selaku agen mungkin memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal). [Alt *et al.*, \(2001\)](#) dalam [Guillamón *et al.*, \(2011\)](#) menyatakan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi diantara agen politik, pasar keuangan, dan pemilih (masyarakat). Dalam penelitiannya, mereka menyarankan dua cara untuk mengurangi masalah tersebut yaitu dengan menginformasikan pemilih (masyarakat) tentang tindakan yang diambil oleh politisi terpilih dan memfasilitasi koordinasi hasil anggaran berimbang antara pihak-pihak yang berkuasa. Transparansi yang lebih tinggi dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat memecahkan masalah keagenan.

Kekuatan politik menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh dan dukungan partai politik akan menghasilkan lingkungan partai yang kompetitif maka akan semakin besar pula tekanan pada pemerintah untuk melakukan transparansi ([Dowley, 2006](#)). Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari partai politik yang mengusungnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut [Dowley \(2006\)](#) kepala daerah yang didukung oleh partai mayoritas atau partai pemenang dalam pemilu memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat sehingga semakin sedikit ruang untuk pemerintah dalam menyembunyikan kegiatan pemerintah daerah, terutama yang penting seperti keputusan anggaran. Hal ini akan

menimbulkan tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan informasi yang lebih baik sehingga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih besar pula ([Sutaryo & Tri Amanu, 2020](#)). Penelitian yang dilakukan oleh [Tejedo-Romero & de Araujo \(2015\)](#) dan [Tavares & da Cruz \(2017\)](#) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah, namun penelitian yang dilakukan oleh [Pranaswati & Kiswanto \(2020\)](#) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah. Dalam penelitiannya [Tejedo-Romero & de Araujo \(2015\)](#) menemukan bahwa kekuatan politik berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Indonesia saat sekarang telah menganut sistem multipartai, dimana terdapat banyak partai dan tidak hanya satu partai saja yang berkuasa sehingga tidak ada partai yang memiliki suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan terbentuknya koalisi dan oposisi. Semakin besar partai yang mendukung kepala daerah, maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat terhadap kinerja mereka. Hal ini akan menimbulkan tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan informasi yang lebih baik sehingga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih besar pula ([Sutaryo & Tri Amanu, 2020](#)). Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kekuatan politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

Ukuran pemerintah daerah merupakan ukuran yang memperlihatkan besarnya aset yang dimiliki oleh suatu daerah. [Nosihana & Yaya \(2016\)](#) menyatakan bahwa aset dapat menggambarkan seberapa besar pemerintahan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan bahwa semakin banyak juga modal yang ditanam. [Araujo dan Tejedo-Romero \(2016\)](#) berpendapat bahwa pemerintah yang besar mungkin mendapat banyak tekanan dari masyarakat karena sumber daya yang cukup besar tersedia bagi mereka. Dalam teori agensi, terciptanya kondisi ini menyebabkan masyarakat melakukan pengawasan yang lebih ketat karena khawatir terjadinya penyelewengan dana. Dalam upaya mengurangi asimetri informasi terhadap masyarakat yang berprasangka buruk, maka pemerintah perlu mengungkapkan informasi pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan untuk menciptakan transparansi.

Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar memiliki kompleksitas permasalahan yang lebih tinggi, mekanisme kebijakan publik lebih dinamis, dan memperoleh perhatian dari pemerintah atasan dan tuntutan dari masyarakat yang lebih besar. Pemerintah daerah yang lebih besar cenderung akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan, termasuk penganggaran serta pelaporannya ([Handayani et al., 2022](#)). [Krah & Mertens \(2020\)](#) dalam penelitian menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah ditemukan berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian [Nosihana & Yaya \(2016\)](#) dan [Trisnawati & Achmad \(2013\)](#). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh [Adiputra et al., \(2018\)](#) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Pengaruh positif dari ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi telah dikonfirmasi oleh banyak penelitian seperti [pada penelitian Araujo dan Tejedo-Romero \(2016\)](#). Penelitian [Nosihana & Yaya \(2016\)](#) dan [Trisnawati & Achmad \(2013\)](#) juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka kinerja keuangan diharapkan dapat semakin baik yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi publik (transparansi). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia

METODE

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dan mengacu pada pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh pemerintah provinsi Indonesia yang berjumlah 34 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling* untuk 3 tahun pengamatan (2018-2020) sehingga diperoleh sebanyak 102 sampel penelitian. Data dalam penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing pemerintah daerah. Data transparansi diperoleh dari hasil penilaian tingkat transparansi pemerintah daerah di *website* www.komisiinformasi.go.id. Data demokrasi diperoleh dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdapat di *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Data kekuatan politik diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data ukuran pemerintah daerah diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masing-masing provinsi.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

a. Transparansi Pemerintah Daerah (Y)

Informasi mengenai kondisi transparansi dipublikasikan melalui *website* resmi Komisi Informasi Pusat. Menurut [Muhtar et al., \(2017\)](#) pengukuran transparansi menggunakan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat dianggap lebih representatif dan komprehensif sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang KIP.

Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
2. Badan publik dalam hal ini pemda mengisi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang dilengkapi dengan penyertaan bukti atau dokumen pendukung dari masing-masing badan publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah berjalan
3. Verifikasi oleh tim Komisi Informasi Pusat. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan atas setiap dokumen pendukung yang dilampirkan, melakukan kunjungan langsung ke lapangan (visitasi), serta melakukan wawancara kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat lain yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama di setiap badan publik yang bertujuan untuk lebih memastikan akurasi data pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah disampaikan dalam kuesioner.
4. Presentasi oleh badan publik untuk menilai inovasi dan kolaborasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Adapun pembobotan nilai untuk masing-masing tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat adalah 30% untuk pengisian kuesioner, 30% untuk verifikasi dan 40% untuk visitasi dan presentasi. Badan publik yang berhasil memperoleh poin 90-100 akan mendapat peringkat informatif, poin 80-89 menuju informatif, poin 60-79,9 dengan posisi cukup informatif. Selanjutnya badan publik yang mendapat poin 40-59,9 mendapat peringkat kurang informatif. Sedangkan badan publik dengan nilai di bawah 30 termasuk kategori yang tidak informatif. Dalam pengukuran variabel transparansi pemerintah daerah yang menggunakan hasil monev maka setiap item diberi angka sebagai berikut:

- 1) Angka 0 untuk provinsi yang tidak informatif
- 2) Angka 1 untuk provinsi yang kurang informatif
- 3) Angka 2 untuk provinsi yang cukup informatif
- 4) Angka 3 untuk provinsi yang menuju informatif
- 5) Angka 4 untuk provinsi yang informatif

b. Demokrasi (X1)

Pada penelitian ini demokrasi diukur berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100.

c. Kekuatan Politik (X2)

Mengacu pada penelitian [Tejedo-Romero & de Araujo \(2015\)](#) dan Sutaryo & Tri Amanu (2020) proksi kekuatan politik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy* dimana angka “1” diberikan jika kepala daerah didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif, dan angka “0” jika kepala daerah tidak didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif.

d. Ukuran Pemerintah Daerah (X3)

Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh [Laswad et al., \(2005\)](#) yang menyatakan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan total aset. Dengan demikian, dalam penelitian ini total aset diukur dengan menggunakan natural logaritma.

$$SIZE = Ln \text{ Total Aset}$$

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat arah dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 DEMO + \beta_2 POLSTRENGTH + \beta_3 SIZE + e$$

Keterangan:

- Y = Transparansi pemerintah daerah
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- DEMO = Demokrasi
- IDEPOL = Kekuatan Politik
- SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah
- e = *Standard error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk transparansi memiliki nilai minimum 0 yang menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berada pada kategori tidak informatif yang sumbernya berasal dari laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. Nilai maksimum yaitu 4 yang berarti bahwa pemerintah provinsi masuk pada kategori informatif. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,03 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,510. Demokrasi memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 57,62 hingga nilai maksimum sebesar 83,45 dan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 74,1498 dengan standar deviasi sebesar 5,55575. Kekuatan politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,79 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,411, memiliki rentang nilai minimum 0 yang menunjukkan bahwa kepala daerah tidak didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif. Nilai maksimum 1 yang berarti bahwa kepala daerah didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif, sedangkan untuk ukuran pemerintah daerah memiliki rentang nilai minimum sebesar 28,46 oleh Provinsi Gorontalo tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp2.282.380.794.787,45. Provinsi Jawa

Timur tahun 2020 memiliki total aset sebesar Rp41.930.873.976.718,80 dan berada pada titik nilai maksimum yaitu 31,37. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.1074 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,74588.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas yang menggunakan 34 pemerintah provinsi dengan jumlah sampel 102 menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Hasil Uji
Normalitas
dengan
Kolmogorov-
Smirnov (K-S)
Sebelum
Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 ^e

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi tidak normal. Untuk mengatasi hal tersebut, penormalan data dilakukan dengan membuang data outlier, sehingga sampel yang mulanya berjumlah 102 menjadi 99 sampel. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) setelah outlier disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji
Normalitas
dengan
Kolmogorov-
Smirnov (K-S)
Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	99
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,200. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* menunjukkan nilai >0,10 dimana untuk variabel demokrasi (DEMO) memiliki nilai VIF sebesar 1,035 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,966. Variabel kekuatan politik (POLSTRENGTH) memiliki nilai VIF sebesar 1,048 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,955. Pada variabel ukuran pemerintah daerah (SIZE) memiliki nilai VIF sebesar 1,072 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,933. Berdasarkan rincian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai sig variabel demokrasi (DEMO) sebesar 0,910, nilai sig kekuatan politik (POLSTRENGTH) sebesar 0,870, dan nilai sig ukuran pemerintah daerah (SIZE) sebesar 0,795. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji *Durbin-Watson*. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,424 sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi yang terjadi dalam model regresi karena 1,424 berada di antara -2 dan +2

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapatkan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{TRANSP} = -38,228 + 0,049 \text{ Demo} - 0,382 \text{ Polstrength} + 1,220 \text{ Size} + e$$

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-38.228	5.601
DEMO	.049	.022
IDEPOL	-.382	.299
SIZE	1.220	.167

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari model regresi disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.398	.379	1.190

Tabel 4.
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien determinasi dari *adjusted R square* sebesar 0,379 atau 37,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 37,9% dari variabel transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sisanya yaitu 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji
Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88.905	3	29.635	20.940	.000 ^b
	Residual	134.449	95	1.415		
	Total	223.354	98			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Hasil uji ANOVA atau *F test* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 20,940 > F tabel (2,6974) dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) transparansi pemerintah daerah provinsi dapat dijelaskan oleh variabel demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah

Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik (*t-test*) perlu dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta melihat tingkat signifikansi secara parsial. Hasil uji t disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 5.
Hasil Uji
Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-38.228	5.601		-6.826	.000
	DEMO	.049	.022	.179	2.207	.030
	IDEPOL	-.382	.299	-.104	-1.276	.205
	SIZE	1.220	.167	.603	7.316	.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2022)

Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh apabila memiliki tingkat signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga dalam penelitian ini **hipotesis 1 dan hipotesis 3 diterima**, sedangkan **hipotesis 2 ditolak** karena memiliki nilai signifikansi 0,205 ($0,205 > 0,05$).

Pengaruh Demokrasi terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks demokrasi maka akan semakin tinggi pula transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Elemen penting dalam keberhasilan penerapan demokrasi adalah masyarakat yang memiliki akses informasi mengenai tindakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi indeks demokrasi di suatu wilayah menunjukkan semakin baik kondisi demokrasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah akan melakukan keterbukaan informasi publik yang meningkatkan transparansi.

Untuk di Indonesia belum ditemukan hasil riset mengenai demokrasi dan transparansi, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Krah & Mertens \(2020\)](#) yang menemukan hasil bahwa demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. [Krah & Mertens \(2020\)](#) menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, maka akan mendorong penyelenggaraan pemerintah yang transparan di pemerintah daerah pada khususnya dan sektor publik pada umumnya. Selain

itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Bauhr & Grimes \(2014\)](#) dan Fairbanks *et al.*, (2007) yang menyimpulkan bahwa demokrasi mampu meningkatkan transparansi.

Penelitian ini mendukung teori agensi dimana dalam negara demokrasi, masyarakat (prinsipal) memiliki hak dan kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pemerintahan sehingga pemerintah (agen) dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi kewajibannya. Masyarakat yang memperoleh lebih banyak informasi akan memiliki kemampuan ikut serta yang lebih baik dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi yang tinggi menjadikan pemerintah daerah meningkatkan transparansi pemerintah daerah guna sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah, yang berarti kepala daerah yang didukung maupun tidak didukung oleh salah satu dari 3 partai pertama pemenang pemilu legislatif tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Dowley \(2006\)](#) dan Pranaswati & Kiswanto (2020) yang menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah. Kepala daerah yang didukung oleh partai dengan suara mayoritas menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut. Partai politik juga menuntut agar kepala daerah dapat memenuhi kepentingan partai politik tersebut sehingga mengabaikan kepentingan publik. Selain itu, partai politik dengan suara mayoritas yang mendukung kepala daerah akan menuntut pengembalian biaya politik yang lebih banyak dan menuntut kepala daerah untuk mementingkan kepentingan golongan. Oleh karena itu, pemerintah daerah enggan untuk melakukan keterbukaan informasi atau transparansi (Pranaswati & Kiswanto, 2020)

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga akan mendorong meningkatnya transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia karena masyarakat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintahan daerah. Hasil ini juga sesuai dengan teori agensi bahwa pemerintah (agen) dituntut untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak masyarakat (prinsipal) selaku pemberi wewenang. Ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki pengelolaan yang lebih kompleks, sehingga akan muncul banyaknya asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, maka pemerintah perlu melaporkannya kepada masyarakat. Penyediaan informasi publik yang dapat diakses tentang pemerintah daerah merupakan hak masyarakat. Dengan demikian, transparansi diperlukan sebagai pemenuhan hak masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Krah & Mertens \(2020\)](#), [Nosihana & Yaya \(2016\)](#), [Laswad *et al.*, \(2005\)](#), [Basuony & Mohamed \(2014\)](#), dan [Boubaker *et al.*, \(2011\)](#) yang memperoleh hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Menurut [Krah & Mertens \(2020\)](#) ukuran pemerintah daerah ditemukan memiliki hubungan yang positif terhadap transparansi karena dua alasan. Pertama, pemerintah daerah yang besar memiliki lebih banyak

tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dan tuntutan dari masyarakat sehingga mendorong pemerintahan untuk menjadi lebih transparan.

SIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa demokrasi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dan hipotesis ketiga (H3) diterima, yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa demokrasi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan objek penelitian dari jumlah provinsi di Indonesia tahun 2018-2020 dengan sampel sebanyak 99 pemerintah provinsi dan keterbatasan dalam memperoleh data transparansi pemerintah daerah provinsi di Indonesia karena publikasi hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi yang tidak lengkap untuk tahun 2019. Keterbatasan lainnya yaitu dalam hal memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) karena tidak semua pemerintah provinsi mempublikasikannya di website pemda masing-masing sehingga sulit untuk menemukan data total aset untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah.

Adapun saran untuk riset selanjutnya yaitu dapat menggunakan sampel penelitian pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia agar dapat lebih representatif dalam menggambarkan transparansi pemerintah daerah dalam unit yang berbeda-beda. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam beberapa tahun.

Implikasi riset ini adalah berkontribusi untuk menambah literatur di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik tentang faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan transparansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab / Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 1(1). <https://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/3229>
- Al Asyari, S., & Helmy, H. (2020). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2314–2330. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.214>
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedro-Romero. (2016). Local Government Transparency Index : Determinants of Municipalities' Rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 1–20. <http://dx.doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Basuony, M. A. K., & Mohamed, E. K. A. (2014). Determinants of Internet Financial

Disclosure in GCC Countries. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i1.5085>

127

Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or Resignation: The Implications of Transparency for Societal Accountability. *Governance*, 27(2), 291–320. <https://doi.org/10.1111/gove.12033>

Boubaker, S., Lakhali, F., & Nekhili, M. (2012). The determinants of web-based corporate reporting in France. *Managerial Auditing Journal*, 27(2), 126–155. <https://doi.org/10.1108/02686901211189835>

Curtin, D., & Meijer, A. J. (2006). Does Transparency Strengthen Legitimacy? *Information Polity*, 29(4). <https://doi.org/10.3233/ip-2006-0091>

da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>

Dowley, K. M. (2006). Local Government Transparency in East Central Europe. *Local Government Studies*, 32(5), 563–583. <https://doi.org/10.1080/03003930600896152>

Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in Government Communication. *Journal of Public Affairs*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.1002/pa>

Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akruar Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>

Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and Financial Transparency of Local Governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>

Martani, D., Fitriyanti, D., & Annisa. (2013). Transparansi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 5. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/974>

Muhtar, M., Putro, D. A., & Sutaryo, S. (2017). Penentu Transparansi Pemerintah Daerah: Sebuah Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 141–156. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art6>

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>

JAA

7.1

Septiani, Maya. 2020. "Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik". available online: www.ombudsman.go.id (accessed on August 31, 2022)

Pranaswati, H. V., & Kiswanto. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273–289.

<https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862>

- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (H. Hadjarati (ed.); Cetakan Pe). PT Pustaka Indonesia Press.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>
- Tejedo-Romero, F., & de Araujo, J. F. F. E. (2015). Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data. *Administration and Society*, 50(4), 1–28. <https://doi.org/10.1177/0095399715607288>
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Malang, Universitas Bramijaya*.